EVALUASI KETEPATAN SASARAN DISTRIBUSI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BERBASIS ANALISIS SPASIAL DI KELURAHAN SIMPANG KELAYANG, KECAMATAN KELAYANG, KABUPATEN INDRAGIRI HULU

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)

Perencanaan Wilayah dan Kota

Disusun Oleh:

DHINDA TRI YANTI

220205004

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

TELUK KUANTAN

2026 M/1447 H

LEMBAR PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Dhinda Tri Yanti
NPM	: 220205004
Program Studi	: Perencanaan Wilayah dan Kota
Judul Skripsi	: Evaluasi Ketepatan Sasaran Distribusi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Analisis Spasial di Kelurahan Simpang Kelayang

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas keaslian dan orisinalitas isi skripsi dan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukan gagasan atau pendapat dari penulis lain, yang seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 15 September 2026

Yang menyatakan



DHINDA TRI YANTI

NPM. 220205004

LEMBAR PERSETUJUAN

EVALUASI KETEPATAN SASARAN DISTRIBUSI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BERBASIS ANALISIS SPASIAL DI KELURAHAN SIMPANG KELAYANG

Oleh:

DHINDA TRI YANTI
220205004

Disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi dan Komprehensif

Oleh

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Retni Pratiwi, SE., MM	**Agus Candra, ST., M.Si**
NIDN. 1023018902	**NIDN. 1020088701**

LEMBAR PENGESAHAN

EVALUASI KETEPATAN SASARAN DISTRIBUSI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) BERBASIS ANALISIS SPASIAL DI KELURAHAN SIMPANG KELAYANG

Oleh:

DHINDA TRI YANTI
220205004

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 15 September 2026

Dinyatakan telah memenuhi syarat.

Teluk Kuantan, 15 September 2026

Disahkan oleh Dewan Penguji

Jabatan dalam Seminar	Nama Dewan Seminar	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Ria Asmeri Jafra, ST., MT	
Pembimbing I	Dr. Retni Pratiwi, SE., MM	
Pembimbing II	Agus Candra, ST., M. Si	
Penguji Utama	Rikki Afrizal, S.Pd. M.Sc	
Anggota Penguji	Riki Ruspianda, S.P., M.Si	

Dekan
Fakultas Teknik

Agus Candra, ST., M.Si
NIDN: 1020088701

Kaprodi
Perencanaan Wilayah dan Kota

Rikki Afrizal, S.Pd. M.Sc
NIDN: 1022128603

ABSTRAK

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan pangan. Ketepatan sasaran menjadi aspek penting karena berkaitan dengan kesesuaian penerima bantuan dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program. Penelitian ini bertujuan menganalisis persebaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT berdasarkan lokasi dan desil kesejahteraan serta mengevaluasi ketepatan sasaran distribusi BPNT berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi KPM di Kelurahan Simpang Kelayang. Penelitian menggunakan metode deskriptif-evaluatif dengan pendekatan kualitatif yang didukung data kuantitatif sederhana dan analisis spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Data diperoleh melalui kuesioner terhadap 80 KPM, wawancara, observasi, dokumentasi, data penerima bantuan, data desil kesejahteraan, dan data spasial lokasi tempat tinggal KPM. Analisis spasial digunakan untuk menggambarkan persebaran KPM, sedangkan evaluasi ketepatan sasaran dilakukan dengan melihat kondisi sosial ekonomi KPM, desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta karakteristik kelompok sasaran program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 80 KPM tersebar di empat lingkungan, yaitu Kedondong, Pasar, Batu Betanam, dan Lebuh Pendek. Berdasarkan desil, terdapat 13 KPM Desil 1, 33 Desil 2, 14 Desil 3, dan 20 Desil 4. Secara umum, KPM memiliki keterbatasan ekonomi, meskipun ditemukan enam KPM dengan kondisi relatif lebih baik. Distribusi BPNT secara umum telah mengarah pada kelompok kesejahteraan rendah, tetapi verifikasi dan pemutakhiran data tetap diperlukan secara berkala, lebih akurat, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Bantuan Pangan Non Tunai, ketepatan sasaran, Keluarga Penerima Manfaat, DTSEN, desil kesejahteraan, analisis spasial.

ABSTRACT

The Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) is a form of social protection aimed at helping poor and vulnerable households meet their food needs. Targeting accuracy is an important aspect of the program because it concerns the suitability of beneficiaries with the groups targeted by the program. This study aims to analyze the spatial distribution of BPNT Beneficiary Households (KPM) based on location and welfare deciles and to evaluate the targeting accuracy of BPNT distribution based on the social and economic conditions of KPM in Simpang Kelayang Urban Village. This study uses a descriptive-evaluative method with a qualitative approach supported by simple quantitative data analysis and spatial analysis using Geographic Information Systems (GIS). Data were collected through questionnaires involving 80 KPM, interviews, observations, documentation, beneficiary data, welfare decile data, and spatial data on KPM residential locations. Spatial analysis was used to describe the distribution of KPM, while targeting accuracy was evaluated by examining the social and economic conditions of KPM, welfare deciles in the National Single Socio-Economic Data (DTSEN), and the characteristics of the program's target groups. The results show that 80 KPM are distributed across four neighborhoods: Kedondong, Pasar, Batu Betanam, and Lebuh Pendek. Based on welfare deciles, there are 13 KPM in Decile 1, 33 in Decile 2, 14 in Decile 3, and 20 in Decile 4. In general, KPM experience economic limitations, although six KPM have relatively better conditions. BPNT distribution generally reaches lower-welfare groups, but regular data verification and updating remain necessary.

Keywords: *Non-Cash Food Assistance Program, targeting accuracy, beneficiary households, DTSEN, welfare deciles, spatial analysis.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ..... **vii**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **viii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **viii**
ABSTRAK ..... **ix**
ABSTRACT ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 5
1.3. Tujuan Penelitian 5
1.4. Manfaat Penelitian 5
BAB II **8**
LANDASAN TEORI **8**
2.1. Kemiskinan 8
2.2. Perlindungan Sosial 11
2.3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 15
2.4. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) 21
2.5. Desil Kesejahteraan 25
2.6. Evaluasi Kebijakan 32
2.7. Ketepatan Sasaran, Inclusion Error, dan Exclusion Error 36
2.8. Analisis Spasial dan Sistem Informasi Geografis (SIG) 42
2.9. Penelitian Terdahulu 47
BAB III **49**
METODE PENELITIAN **49**
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 49
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 50
3.2.1. Lokasi Penelitian 50
3.2.2. Waktu Penelitian 51
3.3. Variabel Penelitian 51
3.4. Jenis dan Sumber Data 52

3.4.1. Data Primer 52
3.4.2. Data Sekunder 52
3.5. Subjek Penelitian 52
3.6. Teknik Pengumpulan Data 54
3.7. Teknik Analisis Data 54
3.7.1. Persiapan Data 55
3.7.2. Pemetaan (Mapping) 56
3.7.3. Analisis Spasial 56
3.7.4. Analisis Ketepatan Sasaran 57
3.7.5. Penyajian Data 58
3.7.6. Analisis Deskriptif Kualitatif 58
3.7.7. Penarikan Kesimpulan 59
3.8. Kerangka Pikir 60
BAB V 61
PENUTUP 61
5.1. Kesimpulan 61
5.2. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 65

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar pembangunan nasional di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2025 mencapai 23,36 juta jiwa (8,25 persen), dengan kesenjangan antara wilayah perkotaan (6,60 persen) dan perdesaan (10,72 persen), sehingga penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas kebijakan yang memerlukan ketepatan sasaran (Badan Pusat Statistik, 2026).

Salah satu instrumen perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yaitu bantuan berupa saldo elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat digunakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk membeli bahan pangan di e-Warong, berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2017 dan Permensos No. 11 Tahun 2018 (Hermawati et al., 2022). Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial menetapkan tujuh indikator kinerja (prinsip 7T), di mana tepat sasaran menjadi aspek paling krusial karena menentukan apakah bantuan benar-benar menjangkau kelompok yang berhak (Hermawati et al., 2022).

Dalam perspektif evaluasi kebijakan publik, ketepatan sasaran merupakan salah satu kriteria penting untuk keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan kebijakannya (Dunn, 2003). Oleh karena itu, evaluasi terhadap ketepatan sasaran distribusi Bantuan Pangan Non Tunai menjadi penting untuk mengetahui apakah bantuan telah diterima oleh rumah tangga yang memang layak sesuai tujuan kebijakan (Dunn, 2003; Hermawati et al., 2022).

Walaupun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai. Febiyanti dan Rosdiana (2026) menemukan bahwa permasalahan yang paling sering muncul meliputi belum optimalnya pemutakhiran data, lemahnya verifikasi dan validasi, serta rendahnya koordinasi antarinstansi, sehingga masih ditemukan rumah tangga miskin yang belum menerima bantuan sementara rumah tangga dengan kondisi ekonomi lebih baik masih tercatat sebagai penerima. Temuan serupa juga muncul di tingkat daerah: penelitian Firdaus, Sujianto, dan Yuliani (2022) di Kecamatan Bengkalis menemukan pembaruan data yang belum berkala; Firdausi dan Hertati (2022) di Desa Glagahan, Jombang, menemukan ketidaksesuaian kondisi ekonomi penerima dengan kriteria yang ditetapkan; sementara Ramadhani dan Sihombing (2024) di Desa Tebing Tanjung Selamat, Langkat, menemukan masyarakat mampu yang masih menerima bantuan sementara rumah tangga miskin belum terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat. Berbagai temuan tersebut menegaskan bahwa persoalan ketepatan sasaran masih menjadi tantangan yang dihadapi implementasi Bantuan Pangan Non Tunai di berbagai daerah.

Sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan akurasi penetapan penerima bantuan sosial, sejak, tahun 2025 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan sebagai basis data sosial ekonomi dalam peyelenggaraan berbagai program pemerintah. Penggunaan data tersebut menjadi relevan dalam evaluasi ketepatan sasaran Bantuan Pangan Non Tunai karena kondisi penerima manfaat perlu dibandingkan dengan data sosial ekonomi yang menjadi dasar penetapannya.

Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), Kelurahan Simpang Kelayang memiliki sebanyak 667 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 2.294 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 322 kepala keluarga termasuk ke dalam kelompok desil 1 sampai desil 4 yang menunjukan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah dan menjadi prioritas dalam penetapan penerima berbagai program bantuan sosial, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Data tersebut menjadi penting dalam penelitian karena digunakan sebagai salah satu dasar untuk melihat kesesuaian kondisi kesejahteraan masyarakat dengan penerima Bantuan Pangan Non Tunai.

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Kelurahan Simpang Kelayang menunjukkan adanya indikasi ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berdasarkan wawancara pendahuluan terhadap beberapa penerima manfaat, ditemukan bahwa terdapat penerima yang memiliki usaha aktif, kendaraan bermotor, serta kondisi ekonomi yang relatif lebih baik dibandingkan dengan kriteria penerima bantuan. Di sisi lain, masih terdapat masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan berdasarkan kondisi sosial ekonominya, tetapi belum terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, beberapa responden juga menyampaikan bahwa mereka belum pernah mengikuti proses pendataan ulang maupun verifikasi kondisi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Temuan awal tersebut mengindikasikan bahwa proses pemutakhiran data penerima manfaat masih perlu mendapat perhatian agar penyaluran bantuan dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dua bentuk kesalahan penargetan *(targeting error)*, yaitu *inclusion error*, ketika bantuan diterima oleh rumah tangga

yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria penerima manfaat, dan *exclusion error*, yaitu kondisi ketika rumah tangga yang memenuhi kriteria justru tidak memperoleh bantuan. Kedua bentuk kesalahan tersebut dapat mengurangi efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena tujuan utama program untuk membantu masyarakat miskin dan rentan tidak sepenuhnya tercapai (Febiyanti & Rosdiana, 2026). Untuk mengevaluasi kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai alat analisis spasial untuk memetakan persebaran penerima dan menghubungkannya dengan kondisi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan spasial diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pola persebaran penerima serta mendukung identifikasi ketidaksesuaian sasaran (Khairi, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa berbagai penelitian terdahulu lebih banyak membahas efektivitas pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari aspek administrasi, implementasi kebijakan, maupun kualitas pelayanan. Sementara itu, penelitian yang mengintegrasikan evaluasi ketepatan sasaran dengan analisis spasial pada tingkat kelurahan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sebaran penerima serta mengevaluasi ketepatan sasaran distribusi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Simpang Kelayang menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sekaligus menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan akurasi penetapan Keluarga Penerima Manfaat sehingga

pelaksanaan program bantuan sosial dapat berlangsung secara lebih efektif, tepat sasaran, dan berkeadilan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persebaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Simpang Kelayang berdasarkan lokasi dan kelompok desil kesejahteraan?
2. Bagaimana ketepatan sasaran distribusi Bantuan Pangan Non Tunai berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Simpang Kelayang?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis persebaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kelurahan simpang kelayang berdasarkan lokasi dan kelompok desil kesejahteraan.
2. Untuk mengevaluasi ketepatan sasaran distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat di kelurahan simpang kelayang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, administrasi publik, serta kebijakan sosial yang berkaitan dengan evaluasi ketepatan sasaran program bantuan sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pemanfaatan analisis spasial dalam

mengidentifikasi dan menggambarkan persebaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta keterkaitannya dengan kondisi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian evaluasi kebijakan publik, khususnya dalam menilai ketepatan sasaran program bantuan sosial berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan aspek ketepatan *(appropriateness)* menurut Dunn (2016).

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Kementerian Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan ketepatan sasaran distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), khususnya melalui informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan hasil penilaian lapangan. Hasil penelitian juga dapat memberikan masukan dalam proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data penerima manfaat agar lebih sesuai dengan kondisi aktual masyarakat.

2. Bagi Pemerintah Kelurahan dan Pendamping Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama dengan mempertimbangkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian dapat mendukung upaya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai yang lebih sesuai dengan kondisi penerima manfaat.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai persebaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai serta kondisi

kesejahteraan rumah tangga penerima berdasarkan hasil penilaian lapangan. Informasi tersebut diharapkan dapat mendukung transparansi dan memberikan gambaran mengenai ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial di Kelurahan Simpang Kelayang.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji evaluasi program bantuan sosial, khususnya dalam menganalisis ketepatan sasaran penerima bantuan berdasarkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemanfaatan analisis spasial untuk mengidentifikasi persebaran penerima bantuan serta keterkaitannya dengan kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan pembangunan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Permasalahan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga mencerminkan keterbatasan individu maupun rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, perumahan, serta berbagai pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, kemiskinan dipandang sebagai persoalan multidimensional yang memerlukan penanganan secara komprehensif melalui kebijakan pembangunan dan perlindungan sosial.

Menurut Sen (1999), kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan memperoleh pendapatan, tetapi juga sebagai *capability deprivation*, yaitu kondisi ketika seseorang tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang layak. Pendekatan kapabilitas menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak cukup diukur dari besarnya pendapatan, melainkan juga dari kemampuan individu dalam mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui perluasan kesempatan dan akses terhadap berbagai sumber daya pembangunan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Todaro dan Smith (2021) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi standar hidup minimum yang berlaku

dalam masyarakat. Standar hidup tersebut meliputi kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Kondisi tersebut berdampak terhadap rendahnya kualitas hidup masyarakat, meningkatnya kerentanan sosial, dan terhambatnya proses pembangunan ekonomi.

2.1.1. Konsep kemiskinan

Berkembang seiring dengan perubahan paradigma pembangunan. Pada awalnya, kemiskinan lebih banyak dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar akibat rendahnya tingkat pendapatan. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena yang lebih kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, serta partisipasi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, kemiskinan dipahami sebagai kondisi multidimensional yang memerlukan pendekatan penanganan yang lebih komprehensif.

Menurut Nugroho & Dahuri (2012), kemiskinan merupakan suatu kondisi absolut atau relatif di suatu wilayah di mana seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma yang berlaku. Jika dipandang dari aspek ekonomi, kemiskinan menunjuk pada kesenjangan antara lemahnya daya beli (*purchasing power)* dan keinginan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Secara konsep, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Kemiskinan absolut merupakan kondisi ketika tingkat pendapatan atau pengeluaran seseorang berada di bawah batas minimum yang ditetapkan untuk >

Kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dengan acuan garis kemiskinan, sedangkan kemiskinan relatif menunjukkan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan masyarakat di sekitarnya dan berkaitan dengan kesenjangan pendapatan atau kesejahteraan (Nugroho & Dahuri, 2012).

2.1.2. Kriteia/karakteristik Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya dilihat dari pendapatan, tetapi juga dari kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Berdasarkan Kepmensos Nomor 262/HUK/2022 dan indikator sosial-ekonomi BPS, kriteria kemiskinan dapat dilihat dari aspek pendidikan, kondisi hunian, fasilitas dasar dan kondisi ekonomi sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Aspek	Indikator yang dapat digunakan	Kriteria/indikasi kemiskinan	Sumber
Pendapatan & Pekerjaan	Kondisi pekerjaan/ penghasilan kepala keluarga	Kepala keluarga/pengurus keluarga tidak bekerja atau tidak memiliki penghasilan tetap	Kepmensos No.262/HUK/2022
Kemampuan memenuhi kebutuhan pangan	Kondisi konsumsi pangan	Pernah khawatir tidak makan/pernah tidak makan dalam satu tahun terakhir;pengeluaran makanan lebih dari setengah total pengeluaran	Kepmensos No.262/HUK/2022
Kebutuhan sandang	Pengeluaran pakaian	Tidak terdapat pengeluaran untuk pakaian selama satu tahun terakhir	Kepmensos No.262/HUK/2022
Kondisi tempat tinggal	Lantai dan dinding rumah	Sebagian bessar lantai berupa tanah/plesteran;dinding menggunakan bambu, kawat, papan, kayu, terpal, kardus, tembok tanpa plester, rumbia, atau seng	Kepmensos No.262/HUK/2022
Sanitasi	Fasilitas buang air besar	Tidak memiliki jamban sendiri/mengunakan jambar bersama	Kepmensos No.262/HUK/2022
Penerangan	Sumber penerangan rumah	Menggunakan listrik 450 VA/bukan listrik	Kepmensos No.262/HUK/2022
Kepemilikan aset	Tabungan/barang yang dapat dijual	Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai tertentu	Kepmensos No.262/HUK/2022
Luas hunian	Luas lantai per kapita	Kurang dari 8m persegi, per orang	Kepmensos No.262/HUK/2022
Air minum	Sumber air minum	Sumur/mata air tidak terlindung, sungai, atau air hujan	Kepmensos No.262/HUK/2022
Energi memasak	Bahan bakar memasak	Kayu bakar, arang, atau minyak tanah	Kepmensos No.262/HUK/2022
Pendidikan	Pendidikan kepala keluarga	Tidak sekolah, tidak tamat SD, atau tamat SD	Kepmensos No.262/HUK/2022
Kesehatan	Kemampuan membayar pengobatan	Tidak mampu membayar pengobatan di puskesmas/poliklinik	Kepmensos No.262/HUK/2022

Sumber: Diolah dari Kepmensos No.262/HUK/20222 & indikator sosial-ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS)

peningkatan jumlah penduduk miskin. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan akses pendidikan dan penciptaan lapangan kerja merupakan strategi penting dalam menurunkan angka kemiskinan.

Selain faktor tersebut, pertumbuhan ekonomi juga berperan dalam menurunkan tingkat kemiskinan apabila disertai dengan pemerataan hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan berpotensi meningkatkan kesenjangan sehingga manfaat pembangunan tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat miskin.

2.2. Perlindungan Sosial

2.2.1. Pengertian Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya pencegahan untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi. Melalui sistem perlindungan sosial yang efektif, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap warga negara tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, perlindungan sosial berperan dalam mencegah masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan secara berkelanjutan (*International Labour Organization* [ILO], 2023; Bappenas, 2014).

Di Indonesia, penyelenggaraan perlindungan sosial dilaksanakan melalui berbagai program yang dirancang untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan miskin. Program-program tersebut meliputi bantuan sosial, jaminan sosial, serta berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Salah satu

program bantuan sosial yang menjadi bagian dari sistem perlindungan sosial nasional adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), yang bertujuan membantu keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan melalui mekanisme bantuan non tunai. Program ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, mengurangi beban pengeluaran, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara lebih tepat sasaran (Kementerian Sosial RI, 2020).

Penyelenggaraan perlindungan sosial merupakan tanggung jawab negara yang berlandaskan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal terssebut menegaskan bahwa negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Sebagai bentuk pelaksanaan amanat konstitusi tersebut, pemerintah mengembangkan berbagai program pelindungan sosial, seperti bantuan sosial, jaminan sosial, dan program pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan serta melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial dan ekonomi.

2.2.2. Tujuan Perlindungan Sosial

Tujuan utama penyelenggaraan perlindungan sosial adalah melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial dan ekonomi agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Selain berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, perlindungan sosial juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, menekan kesenjangan sosial, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga dalam menghadapi berbagai guncangan (*International Labour Organization,* 2023).

Dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial menjadi salah satustrategi penting untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Reformasi tersebut difokuskan pada penguatan sistem pendataan yang terintegrasi, peningkatan akurasi penerima manfaat, integrasi berbagai program bantuan sosial, serta penguatan koordinasi antarlembaga agar penyaluran bantuan menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran (Lampiran I Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun, 2020).

2.2.3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Sosial di Indonesia

Sistem perlindungan sosial di Indonesia secara umum terdiri atas dua komponen utama, yaitu jaminan sosial dan bantuan sosial. Kedua instrumen tersebut saling melengkapi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi. Pemerintah mengembangkan kedua bentuk perlindungan tersebut sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kemiskinan dan kerentanan sosial (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

1. Jaminan Sosial

   Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat melalui mekanisme kepesertaan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar ketika peserta mengalami risiko tertentu, seperti sakit, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau meninggal dunia. Penyelenggaraan jaminan sosial di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

2. Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan tanpa kewajiban membayar iuran. Bantuan sosial bertujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar. Program bantuan sosial yang saat ini diselenggarakan pemerintah antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, bantuan pendidikan, bantuan rehabilitasi sosial, serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya yang ditujukan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009).

2.2.4. Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Perlindungan sosial memiliki hubungan yang erat dengan upaya penanggulangan kemiskinan karena berfungsi melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial dan ekonomi serta membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Dalam kerangka bangunan, perlindungan sosial juga berperan sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan, menekan kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (World Bank, 2022; OECD, 2019*).*

World Bank (2022) menegaskan bahwa efektivitas program perlindungan sosial sangat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran *(targeting)*. Penargetan bukan merupakan tujuan utama dari perlindungan sosial, melainkan suatu instrumen untuk

memastikan bahwa sumber daya yang terbatas dapat diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Melalui penargetan yang tepat, dampak program terhadap pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi lebih optimal (World Bank, 2022).

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia terus melakukan pembenahan sistem perlindungan sosial melalui penyempurnaan basis data penerima manfaat agar proses penargetan menjadi lebih akurat. Perbaikan kualitas data, mekanisme verifikasi, pemutakhiran data secara berkala, serta penguatan sistem registrasi sosial merupakan langkah penting untuk meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial sehingga manfaat program dapat diterima oleh rumah tangga yang benar-benar membutuhkan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021; World Bank, 2022).

Dalam penelitian ini, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dipandang sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan serta membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan. Evaluasi terhada ketepatan sasaran penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai menjadi penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.

2.3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

2.3.1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu program bantuan sosial pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kebijakan perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga

miskin dan rentan. Program ini mulai diterapkan secara bertahap pada tahun 2017 sebagai transformasi dari Program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang sebelumnya disalurkan dalam bentuk beras. Transformasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial pangan. (Kementerian Sosial RI, 2017).

Menurut Pedoman Umum Program Sembako, BPNT merupakan bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan tersebut digunakan untuk membeli bahan pangan melalui e-Warong atau agen penyalur yang bekerja sama dengan bank penyalur. Sejak tahun 2020, pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai diintegrasikan ke dalam Program Sembako, dengan peningkatan nilai bantuan dan perluasan jenis komoditas pangan yang dapat dibeli oleh Keluarga Penerima Manfaat. (Kementerian Sosial RI, 2020).

Transformasi Bantuan Pangan Non Tunai menjadi Program Sembako bertujuan memberikan keleluasaan kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam memilih bahan pangan sesuai kebutuhan rumah tangga. Selain beras dan telur, penerima manfaat dapat membeli berbagai sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin, dan mineral sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan status gizi masyarakat miskin. (Kementerian Sosial RI, 2020).

2.3.2. Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Program Bantuan Pangan Non Tunai yang kemudian dilaksanakan melalui Program Sembako bertujuan mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan

melalui pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin. Berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako, tujuan penyelenggaraan program ini meliputi:

1. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan.
2. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
3. Meningkatkan ketepatan sasaran, ketepatan waktu, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial.
4. Mendorong inklusi keuangan melalui pemanfaatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai instrumen penyaluran bantuan.
5. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan e-Warong atau agen penyalur sebagai mitra pemerintah dalam distribusi bantuan. Kementerian Sosial RI. (2020). *Pedoman Umum Program Sembako.*

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai tidak hanya berfungsi sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan sosial yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sistem penyaluran bantuan yang lebih efektif dan inklusif.

2.3.3. Dasar Hukum Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai bagian dari Program Sembako didasarkan pada berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum

penyelenggaraan bantuan sosial pangan di Indonesia. Beberapa regulasi tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34

   Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar Konstitusional bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Ketentuan ini mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Undang-undang ini menjadi dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan tersebut mendukung pelaksanaan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

   Undang-undang ini mengatur penanganan fakir miskin melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami keterbatasan sosial dan ekonomi.
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Peraturan ini menjadi dasar penyaluran bantuan sosial secara non tunai dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan ketepatan sasaran. Peraturan ini berkaitan langsung dengan perkembangan pelaksanaan BPNT.
5. Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020. Pedoman ini menjadi acuan teknis pelaksanaan Program Sembako, meliputi mekanisme penyaluran,

Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hak dan kewajiban penerima, serta pengawasan dan evaluasi program.

6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako. Peraturan ini mengatur penyelenggaraan Program Sembako dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga relevan sebagai dasar dalam penelitian mengenai ketepatan sasaran penerima bantuan.
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menjadi dasar kebijakan dalam pemanfaat DTSEN sebagai basis data sosial dan ekonomi nasional untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk perlindungan sosial. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional digunakan sebagai acuan untuk melihat kondisi sosial-ekonomi dan peringkat kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya berdasarkan kelompok desil kesejahteraan.
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Regulasi tersebut menjadi landasan dalam penetapan sasaran penerima manfaat, mekanisme penyaluran bantuan, pengelolaan data sosial ekonomi, serta

pengawasan pelaksanaan program sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

2.3.4. Sasaran Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sasaran utama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berasal dari kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin. Penetapan penerima manfaat dilakukan berdasarkan data sosial dan ekonomi yang dikelola pemerintah sebagai dasar dalam menentukan rumah tangga yang menjadi sasaran bantuan sosial (Kementerian Sosial RI, 2020; Republik Indonesia, 2011).

Seiring dengan perkembangan kebijakan perlindungan sosial, proses penetapan penerima manfaat mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data yang mengintegrasikan data sosial dan ekonomi masyarakat. Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional diarahkan untuk meningkatkan akurasi penargetan bantuan sosial, mengurangi duplikasi data, serta mendukung penyaluran bantuan kepada masyarakat yang sesuai dengan kelompok sasaran (Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025).

Ketepatan penetapan sasaran merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai. Ketidaktepatan dalam penargetan dapat menimbulkan *inclusion error*, yaitu kondisi ketika rumah tangga yang tidak sesuai dengan kelompok sasaran menerima bantuan, maupun *exclusion error*, yaitu kondisi ketika rumah tangga yang sesuai dengan kelompok sasaran tidak menerima bantuan. Oleh karena itu, ketepatan sasaran menjadi salah satu aspek yang penting dalam mengevaluasi kesesuaian penyaluran bantuan sosial dengan kondisi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program (Kementerian Sosial RI, 2020; World Bank, 2022).

2.4. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

2.4.1. Pengertian Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan sistem data nasional yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai kebijakan pembangunan yang memerlukan informasi sosial dan ekonomi penduduk secara akurat. Pembentukan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional bertujuan menyediakan satu basis data yang terpadu, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pemerintah secara lebih efektif (Republik Indonesia, 2025).

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dibentuk melalui integrasi berbagai sumber data yang sebelumnya dikelola secara terpisah oleh kementerian dan lembaga, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta berbagai data administrasi pemerintah lainnya. Proses integrasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih lengkap, akurat, konsisten, dan selalu diperbarui sehingga dapat digunakan sebagai acuan bersama dalam penyelenggaraan berbagai program pemerintah (Badan Pusat Statistik, 2025).

Sebagai basis data nasional, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional tidak hanya digunakan dalam penyelenggaraan bantuan sosial, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan masyarakat, serta perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan adanya satu data nasional, diharapkan tidak lagi terjadi perbedaan data

penerima manfaat antarinstansi pemerintah sehingga efektivitas pelaksanaan program dapat terus ditingkatkan (Republik Indonesia, 2025).

2.4.2. Tujuan Pembentukan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025, pembentukan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional bertujuan mewujudkan satu data sosial dan ekonomi nasional yang dapat digunakan secara bersama oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai dasar penyelenggaraan program pembangunan dan perlindungan sosial. Melalui penggunaan satu basis data nasional, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat (Republik Indonesia, 2025).

Selain itu, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nnasional bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial melalui penyediaan data penerima manfaat yang lebih akurat dan mutakhir. Penggunaan satu basis data nasional diharapkan mampu mengurangi terjadinya *inclusion error*, yaitu pemberian bantuan kepada masyarakat yang tidak berhak menerima, serta *exclusion error*, yaitu tidak terdatanya masyarakat yang sebenarnya memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025).

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional juga bertujuan memperkuat koordinasi antarinstansi pemerintah dalam pengelolaan data sosial ekonomi. Integrasi data antar kementerian dan lembaga memungkinkan pengambilan

keputusan berbasis data yang lebih tepat sehingga mendukung pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Badan Pusat Statistik, 2025).

2.4.3. Penyusunan dan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) disusun melalui integrasi berbagai sumber data sosial ekonomi yang dimiliki pemerintah, antara lain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta berbagai data administrasi yang dikelola oleh kementerian dan lembaga terkait. Integrasi tersebut bertujuan menghasilkan satu basis data nasional yang lebih lengkap, akurat, konsisten, dan dapat digunakan secara bersama sebagai dasar penyelenggaraan program perlindungan sosial maupun kebijakan pembangunan lainnya (Badan Pusat Statistik, 2025*)*.

Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dilakukan secara berkala untuk mengakomodasi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti perubahan tingkat pendapatan, pekerjaan, komposisi anggota rumah tangga, status kependudukan, maupun perubahan alamat tempat tinggal. Pemutakhiran tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga akurasi data sehingga program bantuan sosial, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat (Badan Pusat Statistik, 2025).

2.4.4. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah menetapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan berbagai program perlindungan sosial, termasuk Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional bertujuan mewujudkan satu data sosial ekonomi nasional yang terintegrasi sehinggaseluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menggunakan basis data yang sama dalam menetapkan penerima manfaat program bantuan sosial (Republik Indonesia, 2025).

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dimanfaatkan sebagai dasar penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai untuk mendukung penyaluran bantuan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga diharapkan mampu meningkatkan akurasi penargetan bantuan. Selain itu, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional mengelompokkan penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan dalam bentuk desil, sehingga pemerintah dapat menentukan prioritas penerima bantuan secara lebih objektif dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025).

Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional diharapkan dapat mengurangi terjadinya *inclusion error*, yaitu masuknya rumah tangga yang tidak berhak sebagai penerima bantuan, serta *exclusion error*, yaitu tidak tercatatnya rumah tangga yang sebenarnya layak menerima bantuan. Atas dasar itu, penyaluran

Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan menjadi lebih tepat sasaran, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Republik Indonesia, 2025).

Dalam konteks penelitian ini, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional memiliki keterkaitan yang erat dengan evaluasi ketepatan sasaran distribusi Bantuan Pangan Non Tunai karena data tersebut menjadi dasar penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep, mekanisme, dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional diperlukan sebagai landasan teoritis dalam menganalisis kesesuaian antara karakteristik penerima Bantuan Pangan Non Tunai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah penelitian.

2.5. Desil Kesejahteraan

2.5.1. Pengertian Desil Kesejahteraan

Dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial, pemerintah menggunakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu dasar dalam penentuan prioritas penerima manfaat. Salah satu bentuk pengelompokan tersebut adalah desil kesejahteraan, yaitu pembagian seluruh rumah tangga ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan peringkat kondisis sosial ekonomi. Setiap desil mempresentasikan kelompok rumah tangga dengan posisi kesejahteraan relatif tertentu dalam suatu populasi. Pengelompokan tersebut digunakan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data sosial dan ekonomi dalam mendukung pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025).

Desil tidak menunjukkan status kemiskinan secara langsung, melainkan menggambarkan posisi relatif suatu rumah tangga dibandingkan rumah tangga lainnya berdasarkan peringkat kesejahteraan. Rumah tangga yang berada pada desil lebih rendah menunjukan posisi kesejahteraan yang relatif lebih rendah, sedangkan rumah tangga yang berada pada desil lebih tinggi menunjukan posisi kesejahteraan relatif lebih tinggi. Hal ini menunjukan, sistem desil membantu pemerintah dalam menentukan prioritas penerima bantuan secara lebih objektif dan berbasis data (Badan Pusat Statistik, 2025).

Penggunaan desil dalam sistem data sosial ekonomi memberikan dasar bagi pemerintah untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan secara lebih terstruktur. Data tersebut dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam penetapan sasaran berbagai program perlindungan sosial. Namun, kondisi sosial ekonomi rumah tangga bersifat dinamis sehingga posisi desil dapat mengalami perubahan seiring dengan adanya perubahan kondisi rumah tangga dan proses pemutakhiran data (Republik Indonesia, 2025).

2.5.2. Klasifikasi Desil Kesejahteraan

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga Untuk Penyaluran Bantuan Sosial Dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial, tingkat kesejahteraan rumah tangga dikelompokan ke dalam sepuluh desil. Desil 1 menunjukan kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah hingga desil 10 menunjukan kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi (Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, 2025).

Adapun pembagian desil kesejahteraan berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 79/HUK/2025 disajikan pada tabel 2.1:

Tabel 2.2. Pembagian Desil Kesejahteraan Berdasarkan Keputusan Kemensos RI No 79/HUK/2025

DESIL	KARAKTERISTIK UMUM
Desil 1	10% rumah tangga dengan kesejahteraan relatif paling rendah.
Desil 2	11-20% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan relatif rendah
Desil 3	21-30% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan relatif rendah
Desil 4	31-40% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan relatif rendah
Desil 5-6	41-60% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan menengah.
Desil 7-8	61-80% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan lebih tinggi.
Desil 9-10	81-100% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan paling tinggi

Sumber : Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 79/HUK/2025

Berdasarkan ketentuan yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial, kelompok dengan peringkat kesejahteraan yang lebih rendah menjadi kelompok yang mendapat prioritas dalam berbagai program perlindungan sosial. Dalam penelitian ini, informasi desil digunakan sebagai salah satu dasar untuk melihat posisi kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai dalam data pemerintah. Desil 1 sampai dengan desil 4 menjadi perhatian utama karena berada pada kelompok dengan peringkat kesejahteraan relatif rendah dan berkaitan dengan sasaran prioritas program bantuan sosial (Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, 2025).

Status desil bersifat dinamis karena kondisi sosial ekonomi rumah tangga dapat mengalami perubahan. Oleh karena itu pemutakhiran data diperlukan agar peringkat kesejahteraan yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial dapat mencerminkan kondisi masyarakat secara aktual. Pemerintah daerah memiliki peran dalam proses verifikasi dan validasi serta penyampaian perubahan kondisi

masyarakat, sedangkam penetapan peringkat kesejahteraan dilakukan melalui pengolahan data pada tingkat nasional (Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarat, 2025)

1) Pendataan Sebagai Dasar Penetapan Desil

Penetapan peringkat kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi didasarkan pada data sosial dan ekonomi yang dihimpun dari berbagai sumber data nasional. Data tersebut berasal dari kegiatan pendataan dan administrasi pemerintah yang kemudian diintegrasikan untuk membentuk basis data sosial dan ekonomi yang digunakan dalam proses pemeringkatan kesejahteraan. Sumber data dapat mencakup data statistik dan data administrasi dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah yang relevan (Badan Pusat Statistik, 2025; Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 2025).

Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu sumber data sosial ekonomi melalui berbagai kegiatan pendataan, seperti Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), serta kegiatan statistik lainnya. Data yang dihasilkan dapat mencakup berbagai karakteristik sosial ekonomi rumah tangga, seperti kondisi perumahan, pendidikan, pekerjaan, kepemilikan aset, dan karakteristik rumah tangga lainnya (Badan Pusat Statistik, 2025).

Selain data statistik, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional juga memanfaatkan data administrasi dari kementerian dan lembaga pemerintah. Data tersebut dapat berasal dari administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, perpajakan, serta sumber administrasi lainnya yang relevan. Integrasi berbagai sumber data tersebut bertujuan menghasilkan basis data sosial

dan ekonomi yang lebih terpadu untuk mendukung pemeringkatan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 2025).

Dalam proses pemutakhiran data, pemerintah daerah memiliki peran dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap kondisi masyarakat serta menyampaikan perubahan atau ketidaksesuaian data yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, informasi mengenai kondisi aktual masyarakat dapat menjadi bahan dalam proses pemutakhiran data sosial ekonomi nasional. Penetapan peringkat kesejahteraan selanjutnya dilakukan berdasarkan pengolahan data pada tingkat nasional sesuai dengan metodologi yang berlaku (Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, 2025).

2.5.3. Indikator Sosial dan Ekonomi dalam Pengukuran Kesejahteraan

Pengukuran tingkat kesejahteraan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sejumlah indikator sosial dan ekonomi yang dapat menggambarkan kondisi rumah tangga. Penggunaan beberapa indikator secara terpadu dimaksudkan agar penilaian tidak hanya didasarkan pada satu aspek, tetapi mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi yang berkaitan dengan kondisi kesejahteraan rumah tangga.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep dan kajian mengenai kesejahteraan masyarakat serta disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan penelitian. Indikator tersebut dikelompokkan ke dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi sosial dan dimensi ekonomi.

1. Dimensi Sosial

   Dimensi sosial berkaitan dengan karakteristik sumber daya manusia, kondisi tempat tinggal, serta pemenuhan kebutuhan dan akses terhadap fasilitas dasar.

Pendidikan dapat mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan peluang rumah tangga dalam memperoleh kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Selain itu, kondisi hunian dan akses terhadap fasilitas dasar juga dapat menggambarkan kualitas kehidupan dan tingkat kesejahteraan rumah tangga (Nabillah et al., 2023; Mustaqem & Rahman, 2024; Sysnanda et al., 2025).

a) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan digunakan untuk menggambarkan kualitas sumber daya manusia dalam rumah tangga. Indikator yang digunakan meliputi pendidikan terakhir kepala keluarga dan rata-rata tingkat pendidikan anggota keluarga.

Tabel 2.3. Indikator Sosial Tingkat Pendidikan

Indikator	Kategori
Pendidikan terakhir kepala keluarga	Rendah: Tidak Sekolah/SD; Sedang: SMP/SMA; Tinggi: Perguruan Tinggi
Rata-rata pendidikan anggota keluarga	Rendah ,Sedang, Tinggi.

Sumber: BPS (2025), diolah penulis.

b) Kondisi Hunian

Kondisi hunian digunakan untuk menggambarkan kualitas tempat tinggal yang ditempati rumah tangga. Aspek yang diperhatikan meliputi status kepemilikan rumah serta kondidi fisik hunian.

Tabel 2.4. Indikator Sosial Kondisi Hunian

Indikator	Kategori
Status kepemilikan rumah	Milik sendiri; Sewa/kontrak; Menumpang/bebas sewa
Jenis lantai	Disesuaikan dengan kondisi material lantai rumah
Jenis dinding	Disesuaikan dengan kondisi material dinding rumah

Sumber: BPS (2025), diolah penulis.

c) Akses terhadap Fasilitas Dasar

Akses terhadap fasilitas dasar digunakan untuk menggambarkan kemampuan rumah tangga dalam memperoleh layanan dan kebutuhan dasar. Indikator yang

digunakan meliputi akses pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi, listrik, serta akses jalan atau infrastruktur.

Tabel 2.5. Indikator Sosial, Akses Terhadap Fasilitas Dasar

Indikator	Kategori
Akses pendidikan (jarak ke sekolah)	Sulit; Mudah; Sangat mudah
Akses kesehatan (puskesmas/pustu/rumah sakit	Sulit; Mudah; Sangat mudah
Akses air bersih dan sanitasi (jamban/WC)	Tidak tersedia; Tersedia
Akses listrik	Tidak tersedia; Tersedia
Akses jalan atau infrastruktur	Sangat rusak; Rusak; Sedang; Baik; Sangat baik

Sumber: BPS (2025), diolah penulis.

2. Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi berkaitan dengan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kondisi ekonomi yang dimiliki. Pendapatan, kestabilan pekerjaan, serta kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari merupakan aspek yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi rumah tangga. Rumah tangga dengan pendapatan rendah dan pekerjaan yang tidak stabil cenderung memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang lebih tinggi (Maulina et al., 2024; Fitriyasari & Tsani, 2025; Panuna et al., 2024).

Tabel 2.6. Indikator Ekonomi (Pendapatan, Pekerjaan, Aset)

Indikator	Kategori
Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan	Rendah; Sedang; Tinggi
Sumber Pendapatan dan Kestabilan Pekerjaan	Tidak tetap; Tetap
Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Sehari-hari	Sering tidak cukup; Kadang tidak cukup; Cukup; Selalu cukup
Kepemilikan aset/kendaraan	Disesuaikan dengan jenis dan jumlah aset yang dimiliki

Sumber: BPS (2025), diolah penulis.

Penggunaan indikator sosial dan ekonomi secara terpadu memungkinkan kondisi rumah tangga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non

Tunai digambarkan berdasarkan berbagai aspek yang saling melengkapi. Dalam penelitian ini, indikator sosial dan ekonomi diperoleh melalui survei terhadap 80 Keluarga Penerima Manfaat untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan rumah tangga. Hasil tersebut kemudian dikaitkan dengan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran program bantuan sosial berdasarkan ketentuan pemerintah dan sumber resmi yang relevan. Analisis ini menjadi salah satu dasar dalam mengevaluasi ketepatan sasaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai dengan mempertimbangkan informasi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta kondisi aktual rumah tangga penerima.

2.6. Evaluasi Kebijakan

2.6.1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengetahui hasil pelaksanaan kebijakan, mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul selama proses implementasi, serta memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan kebijakan pada masa yang akan datang (Dunn, 2016).

Menurut Dunn (2016), evaluasi kebijakan merupakan proses menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil suatu kebijakan. Evaluasi tidak hanya menilai apakah suatu program telah dilaksanakan, tetapi juga menilai sejauh mana hasil program memberikan manfaat kepada kelompok sasaran dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi berfungsi sebagai mekanisme umpan balik *(feedback)* dalam proses kebijakan

publik, sehingga hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan, meningkatkan efektivitas implementasi, serta memastikan penggunaan sumber daya publik dilakukan secara tepat (Dunn, 2016).

Dalam konteks penelitian ini, evaluasi kebijakan digunakan untuk menilai ketepatan sasaran distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Simpang Kelayang. Evaluasi dilakukan dengan melihat kesesuaian antara status Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai penerima BPNT dengan kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga berdasarkan hasil survei lapangan. Kondisi tersebut kemudian dibandingkan dengan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran program bantuan sosial berdasarkan peraturan dan sumber resmi yang relevan, serta mempertimbangkan informasi desil kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian penerima BPNT dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.

2.6.2. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat dari suatu kebijakan setelah kebijakan tersebut diimplementasikan. Melalui evaluasi, dapat diketahui sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, memberikan manfaat kepada kelompok sasaran, serta memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar pembentukan kebijakan. Selain itu, hasil evaluasi dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam memperbaiki implementasi, menyempurnakan kebijakan yang telah berjalan, maupun merumuskan kebijakan baru yang lebih efektif. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian,

tetapi juga sebagai mekanisme umpan balik *(feedback)* dan pembelajaran *(policy learning)* dalam proses kebijakan publik (Dunn, 2016).

2.6.3. Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn

Menurut Dunn (2016), evaluasi kebijakan dapat dilakukan berdasarkan enam kriteria utama, yaitu efektivitas *(effectiveness),* efisiensi *(efficiency),* kecukupan *(adequacy),* pemerataan *(equity),* responsivitas *(responsiveness),* dan ketepatan *(appropriateness).* Keenam kriteria tersebut digunakan untuk menilai berbagai aspek kinerja suatu kebijakan, mulai dari pencapaian tujuan, penggunaan sumber daya, kemampuan mengatasi masalah, pemerataan manfaat, pemenuhan kebutuhan masyarakat, hingga kesesuaian kebijakan dengan kelompok sasaran.

1. Efektivitas *(Effectiveness)*

   menunjukkan sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. Semakin besar tingkat pencapaian tujuan kebijakan, semakin tinggi tingkat efektivitas kebijakan tersebut (Dunn, 2016).

2. Efisiensi *(Efficiency)*

Efisiensi berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diperoleh dengan sumber daya yang digunakan, seperti biaya, waktu, tenaga, dan fasilitas. Suatu kebijakan dikatakan efisien apabila hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya secara optimal (Dunn, 2016).

3. Kecukupan *(Adequacy)*

Kecukupan menggambarkan sejauh mana hasil yang dicapai melalui suatu kebijakan mampu mengatasi atau mengurangi permasalahan yang menjadi dasar dilaksanakannya kebijakan tersebut (Dunn, 2016).

4. Pemerataan *(Equity)*

Pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat dan beban kebijakan secara adil kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Kriteria ini digunakan untuk melihat apakah manfaat kebijakan telah didistribusikan secara adil sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran (Dunn, 2016).

5. Responsivitas *(Responsiveness)*

Responsivitas menunjukkan sejauh mana hasil suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, harapan, dan kepentingan masyarakat sebagai kelompok yang menerima manfaat kebijakan. Semakin sesuai hasil kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, semakin tinggi tingkat responsivitasnya (Dunn, 2016).

6. Ketepatan *(Appropriateness)*

Ketepatan berkaitan dengan kesesuaian antara tujuan kebijakan, kelompok sasaran, dan hasil yang dicapai. Suatu kebijakan dapat dikatakan tepat apabila pelaksanaan dan manfaatnya sesuai dengan kebutuhan serta kondisi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan (Dunn, 2016).

2.6.4. Kriteria Evaluasi yang Digunakan dalam Penelitian

William N. Dunn mengemukakan enam kriteria dalam evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas *(effectiveness)*, efisiensi *(efficiency)*, kecukupan *(adequacy)*, pemerataan *(equity)*, responsivitas *(responsiveness)*, dan ketepatan *(appropriateness)*. Dalam penelitian ini, evaluasi difokuskan pada kriteria ketepatan *(appropriateness)* karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengevaluasi ketepatan sasaran distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Simpang Kelayang. Penelitian tidak dimaksudkan untuk menilai

keseluruhan kinerja program Bantuan Pangan Non Tunai, tetapi secara khusus menilai kesesuaian penerima bantuan dengan kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga yang menjadi sasaran program.

Kriteria ketepatan *(appropriateness)* dalam penelitian ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan kondisi kesejahteraan rumah tangga berdasarkan karakteristik sosial dan ekonomi. Penilaian tersebut menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah penerima bantuan telah sesuai dengan kelompok sasaran program. Dengan menggunakan kriteria ketepatan, penelitian dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dengan kondisi penerima manfaat di Kelurahan Simpang Kelayang (Dunn, 2016).

2.7. Ketepatan Sasaran, Inclusion Error, dan Exclusion Error

2.7.1. Ketepatan Sasaran Bantuan Sosial

Ketepatan sasaran merupakan salah satu aspek penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program bantuan sosial. Ketepatan sasaran menunjukkan sejauh mana bantuan diberikan kepada rumah tangga yang sesuai dengan kelompok sasaran dan tujuan program. Dalam perspektif evaluasi kebijakan, ketepatan *(appropriateness)* berkaitan dengan kesesuaian antara tujuan kebijakan, kebutuhan kelompok sasaran, serta manfaat yang dihasilkan sehingga kebijakan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat (Dunn, 2016).

Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ketepatan sasaran berkaitan dengan kesesuaian penerima bantuan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang menjadi dasar penetapan kelompok sasaran program. Penetapan penerima bantuan sosial dilakukan dengan memanfaatkan data sosial dan ekonomi

pemerintah, termasuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagai salah satu basis data dalam penargetan dan pemutakhiran penerima manfaat (Republik Indonesia, 2025; Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2025).

Dalam penelitian ini, kelompok desil Keluarga Penerima Manfaat digunakan sebagai informasi mengenai posisi kesejahteraan rumah tangga dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, sedangkan kondisi aktual rumah tangga dinilai berdasarkan indikator sosial dan ekonomi melalui hasil survei lapangan. Penilaian ketepatan sasaran dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan kondisi sosial dan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan hasil survei lapangan dengan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Analisis juga mempertimbangkan informasi desil kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai salah satu sumber informasi mengenai kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Hasil observasi dan wawancara digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi aktual rumah tangga penerima bantuan dan memperkuat interpretasi terhadap kesesuaian penerima dengan sasaran program.

Ketepatan sasaran menjadi aspek penting karena berkaitan dengan efektivitas dan keadilan distribusi bantuan sosial. Apabila bantuan diterima oleh rumah tangga yang kondisi sosial ekonominya sesuai dengan kelompok sasaran, maka penyaluran bantuan dapat dinilai lebih sesuai dengan tujuan program. Sebaliknya, apabila terdapat rumah tangga penerima yang berdasarkan hasil penilaian menunjukkan kondisi kesejahteraan yang relatif lebih baik dan tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, maka kondisi tersebut dapat menjadi indikasi terjadinya *inclusion error*. Sementara itu, kondisi ketika rumah tangga yang memenuhi karakteristik sasaran

tidak menerima bantuan termasuk *exclusion error*, yang dalam penelitian ini tidak dianalisis karena penelitian hanya mencakup rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai.

2.7.2. Inclusion Error

Inclusion error merupakan kondisi ketika rumah tangga yang tidak termasuk dalam kelompok sasaran program bantuan sosial justru tercatat sebagai penerima dan memperoleh manfaat program. Kesalahan penargetan tersebut menyebabkan sumber daya program dialokasikan kepada rumah tangga yang relatif kurang sesuai dengan kelompok sasaran, sehingga dapat mengurangi efektivitas program dalam menjangkau masyarakat yang lebih membutuhkan. *Inclusion error* dapat berkaitan dengan data penerima yang belum mutakhir, perubahan kondisi sosial ekonomi rumah tangga yang belum tercatat, maupun kelemahan dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi penerima manfaat (World Bank, 2022).

Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), *inclusion error* dapat terjadi ketika rumah tangga yang mengalami perubahan atau peningkatan kondisi sosial ekonomi masih tercatat sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan tetap menerima bantuan. Kondisi tersebut dapat menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi aktual rumah tangga dengan kelompok sasaran program. Oleh karena itu, *inclusion error* digunakan sebagai salah satu aspek dalam mengevaluasi ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial.

Dalam penelitian ini, *inclusion error* dianalisis pada rumah tangga yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Analisis dilakukan dengan melihat kesesuaian kondisi sosial dan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan hasil kuesioner dan kondisi aktual yang

ditemukan di lapangan dengan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran program bantuan sosial. Informasi desil Keluarga Penerima Manfaat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menggambarkan kondisi kesejahteraan rumah tangga. Keluarga Penerima Manfaat yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang tidak sesuai dengan karakteristik kelompok sasaran dapat menjadi indikasi adanya *inclusion error*. Hasil analisis tersebut diperkuat melalui observasi dan wawancara mengenai kondisi aktual rumah tangga penerima bantuan. Dengan demikian, identifikasi inclusion error didasarkan pada kesesuaian antara status penerima bantuan, kondisi sosial ekonomi rumah tangga, informasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dan karakteristik kelompok sasaran, bukan semata-mata berdasarkan lokasi atau persebaran spasial penerima.

2.7.3. Exclusion Error

Exclusion error merupakan kondisi ketika rumah tangga yang termasuk dalam kelompok sasaran dan memenuhi karakteristik penerima bantuan sosial tetapi tidak tercatat atau tidak memperoleh manfaat program. Kesalahan penargetan tersebut menyebabkan rumah tangga yang seharusnya memperoleh bantuan tidak mendapatkan manfaat program, sehingga dapat mengurangi pencapaian tujuan perlindungan sosial dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan. *Exclusion error* dapat berkaitan dengan keterbatasan pendataan, data yang belum mutakhir, perubahan kondisi sosial ekonomi yang belum tercatat, serta proses verifikasi dan validasi yang belum optimal (World Bank, 2022).

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT*), exclusion error* dapat terjadi ketika rumah tangga yang memiliki kondisi sosial ekonomi

sesuai dengan kelompok sasaran tetapi tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Identifikasi kondisi tersebut memerlukan informasi mengenai rumah tangga yang tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai sebagai kelompok pembanding, kemudian menilai apakah rumah tangga tersebut memiliki karakteristik yang sesuai dengan kelompok sasaran program.

Dalam penelitian ini, *exclusion error* tidak menjadi fokus analisis karena unit penelitian merupakan rumah tangga yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penelitian tidak mencakup pendataan terhadap rumah tangga nonpenerima yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang sesuai dengan kelompok sasaran program. Oleh karena itu, penelitian difokuskan pada identifikasi *inclusion error* dengan menilai kesesuaian antara status penerima Bantuan Pangan Non Tunai, kondisi sosial dan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan hasil survei lapangan, informasi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, serta karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran program bantuan sosial.

2.7.4. Keterkaitan Ketepatan Sasaran dengan *Inclusion Error* dan *Exclusion Error*

Ketepatan sasaran merupakan salah satu aspek penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial. Ketepatan sasaran berkaitan dengan kesesuaian antara penerima manfaat dengan kelompok sasaran yang dituju oleh program. Dalam penargetan bantuan sosial, ketidaktepatan sasaran dapat ditunjukkan melalui *inclusion error* dan *exclusion error*. *Inclusion error* terjadi ketika rumah tangga yang tidak termasuk dalam kelompok sasaran justru menerima bantuan, sedangkan *exclusion error* terjadi ketika rumah tangga yang termasuk

dalam kelompok sasaran tidak menerima bantuan. Semakin rendah tingkat kesalahan penargetan tersebut, semakin baik tingkat ketepatan sasaran suatu program bantuan sosial.

Dalam penelitian ini, evaluasi ketepatan sasaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) difokuskan pada identifikasi *inclusion error*. Hal tersebut disesuaikan dengan cakupan data penelitian yang terdiri atas rumah tangga yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Kondisi sosial dan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat dianalisis berdasarkan hasil kuesioner terhadap 80 responden untuk menggambarkan kondisi rumah tangga penerima bantuan. Hasil tersebut kemudian dikaitkan dengan informasi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta dibandingkan dengan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran program bantuan sosial berdasarkan peraturan dan sumber resmi yang relevan. Observasi dan wawancara lapangan digunakan untuk memperkuat gambaran mengenai kondisi aktual rumah tangga penerima bantuan. Analisis tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi adanya indikasi *inclusion error* dan menilai ketepatan sasaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai.

Berdasarkan hasil analisis kondisi sosial dan ekonomi, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menunjukkan karakteristik yang tidak sesuai dengan kelompok masyarakat sasaran bantuan dapat menjadi indikasi adanya *inclusion error*. Dengan demikian, ketepatan sasaran dalam penelitian ini dinilai berdasarkan kesesuaian antara status Keluarga Penerima Manfaat sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kondisi sosial dan ekonomi berdasarkan hasil kuesioner, informasi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional

(DTSEN), serta karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran program. Sementara itu, *exclusion error* tidak dianalisis karena penelitian tidak mencakup rumah tangga yang tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai sebagai kelompok pembanding.

Analisis spasial dalam penelitian ini digunakan sebagai pendukung untuk menggambarkan persebaran lokasi Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Simpang Kelayang berdasarkan lokasi tempat tinggal dan kelompok desil kesejahteraan. Hasil pemetaan memberikan gambaran mengenai distribusi dan konsentrasi penerima bantuan secara keruangan, tetapi tidak digunakan sebagai dasar untuk menentukan *inclusion error*. Dengan demikian, pemanfaatan analisis spasial dan evaluasi ketepatan sasaran memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam memberikan gambaran mengenai pelaksanaan distribusi Bantuan Pangan Non Tunai di wilayah penelitian.

2.8. Analisis Spasial dan Sistem Informasi Geografis (SIG)

2.8.1. Pengertian Sistem Informasi Geografis (SIG)

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk memperoleh, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data yang memiliki referensi geografis. Sistem Informasi Geografis mengintegrasikan data spasial (keruangan) dengan data atribut sehingga mampu menghasilkan informasi mengenai lokasi, pola persebaran, hubungan antarruang, serta karakteristik suatu fenomena di permukaan bumi. Kemampuan tersebut menjadikan Sistem Informasi Geografis sebagai salah satu perangkat yang banyak dimanfaatkan dalam proses analisis dan pengambilan keputusan pada berbagai bidang, seperti perencanaan wilayah, pengelolaan lingkungan, transportasi,

kesehatan, mitigasi bencana, serta bidang lainnya yang memerlukan analisis berbasis lokasi (Longley et al., 2015).

Selain berfungsi sebagai media penyimpanan dan visualisasi data, Sistem Informasi Geografis memiliki kemampuan untuk mengolah dan menganalisis data berdasarkan karakteristik keruangan. Integrasi antara data spasial dan data atribut memungkinkan informasi mengenai suatu objek disajikan berdasarkan lokasi serta karakteristik yang melekat pada objek tersebut. Dengan demikian, Sistem Informasi Geografis dapat digunakan untuk menghasilkan informasi keruangan yang membantu dalam memahami pola dan persebaran suatu fenomena serta mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan (Longley et al., 2015).

Dalam penelitian ini, Sistem Informasi Geografis (SIG) digunakan untuk memetakan persebaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan lokasi tempat tinggal Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Simpang Kelayang. Pemetaan tersebut bertujuan untuk menggambarkan distribusi penerima Bantuan Pangan Non Tunai secara keruangan pada wilayah penelitian. Hasil pemetaan kemudian digunakan sebagai gambaran pendukung dalam memahami persebaran Keluarga Penerima Manfaat, sedangkan kondisi sosial dan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat dianalisis berdasarkan hasil survei lapangan. Selanjutnya, ketepatan sasaran program dievaluasi dengan membandingkan kondisi aktual Keluarga Penerima Manfaat dengan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran program bantuan sosial serta informasi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan demikian, Sistem Informasi Geografis berfungsi untuk menggambarkan aspek keruangan persebaran penerima, sedangkan penilaian ketepatan sasaran didasarkan pada

kesesuaian antara status desil dan kondisi sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat.

2.8.2. Analisis Spasial

Analisis spasial merupakan proses pengolahan dan analisis data yang memiliki referensi geografis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, distribusi, dan karakteristik suatu fenomena berdasarkan lokasi. Analisis spasial memanfaatkan keterkaitan antarobjek dalam ruang sehingga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana suatu fenomena tersebar serta karakteristik keruangan yang dimilikinya. Sebagai salah satu fungsi dalam Sistem Informasi Geografis (SIG), analisis spasial dapat mengolah data spasial dan data atribut menjadi informasi yang mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan pada berbagai bidang (Longley et al., 2015).

Dalam penelitian ini, analisis spasial digunakan untuk menggambarkan persebaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Simpang Kelayang berdasarkan lokasi tempat tinggal penerima bantuan. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui distribusi dan pola persebaran Keluarga Penerima Manfaat pada wilayah penelitian serta memberikan gambaran mengenai distribusi penerima bantuan secara keruangan. Analisis spasial dalam penelitian ini tidak digunakan untuk menentukan ketepatan sasaran melalui perbandingan atau tumpang tindih antar-peta. Evaluasi ketepatan sasaran dilakukan melalui analisis kondisi sosial dan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan hasil kuesioner, informasi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran

program bantuan sosial. Kondisi aktual rumah tangga yang diperoleh melalui observasi dan wawancara digunakan untuk memperkuat hasil analisis.

2.8.3. Pemanfaatan SIG dalam Evaluasi Ketepatan Sasaran BPNT

Sistem Informasi Geografis (SIG) memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data yang memiliki informasi keruangan sehingga dapat menghasilkan informasi yang mendukung proses analisis dan pengambilan keputusan. Melalui pemanfaatan Sistem Informasi Geografis, data mengenai lokasi suatu objek dapat disajikan dalam bentuk peta sehingga pola persebaran dan karakteristik keruangan suatu fenomena dapat diketahui. Kemampuan tersebut menjadikan Sistem Informasi Geografis sebagai salah satu perangkat yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, termasuk perencanaan wilayah dan evaluasi program yang memiliki dimensi keruangan (Longley et al., 2015).

Dalam penelitian ini, Sistem Informasi Geografis dimanfaatkan untuk memetakan dan menggambarkan persebaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Simpang Kelayang berdasarkan lokasi tempat tinggal dan kelompok desil kesejahteraan. Pemetaan tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi penerima bantuan pada wilayah penelitian serta konsentrasi penerima pada masing-masing wilayah. Informasi spasial yang dihasilkan selanjutnya menjadi bagian dari gambaran umum dalam mengevaluasi pelaksanaan distribusi Bantuan Pangan Non Tunai.

Evaluasi ketepatan sasaran dalam penelitian ini tidak ditentukan berdasarkan tumpang tindih atau *overlay* antara peta penerima bantuan dan peta tingkat kesejahteraan. Penilaian ketepatan sasaran dilakukan berdasarkan kondisi sosial

dan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diperoleh melalui survei terhadap 80 responden. Kondisi tersebut dianalisis berdasarkan karakteristik sosial dan ekonomi rumah tangga, kemudian dikaitkan dengan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran program bantuan sosial berdasarkan peraturan dan sumber resmi yang relevan. Informasi desil Keluarga Penerima Manfaat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis, sedangkan hasil observasi dan wawancara digunakan untuk memperkuat gambaran mengenai kondisi aktual rumah tangga penerima bantuan.

Dengan demikian, pemanfaatan Sistem Informasi Gegrafis dalam penelitian ini berfungsi sebagai pendukung dalam menggambarkan aspek keruangan persebaran Keluarga Penerima Manfaat, sedangkan evaluasi ketepatan sasaran didasarkan pada kesesuaian antara status penerima bantuan, hasil penilaian tingkat kesejahteraan, dan kondisi sosial ekonomi aktual di lapangan. Hasil tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya *inclusion error*, yaitu kondisi ketika rumah tangga yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai berdasarkan hasil penilaian penelitian menunjukkan kondisi kesejahteraan yang tidak sesuai dengan sasaran penerima bantuan.

2.9. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.7. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & tahun	Judul	Metode Penelitian	Variabel penelitian	Lokasi	Temunn utama
1	(Ahmad firdaus, et al, 2022)	Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis: Suatu Evaluasi	Deskriptif kualitatif; wawancara, observasi, dokumentasi; analisis data model interaktif	Evaluasi menggunakan indikator kebijakan dari William N. Dunn, yaitu: 1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Pemerataan 5. Ketepatan 6. Responsivitas	Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.	Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dinilai belum optimal karena masih terjadi ketidaktepatan sasaran akibat data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum muktakhir. Efisiensi dan responsivitas program tergolong baik, namun pemerataan manfaat belim tercapai sehingga diperlukan pembaruan data penerima secara berkala.
2.	(Asrin, et al, 2022)	Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Baadia, Kota Baubau	Deskriptif kualitatif; observasi, wawancara,dokumentasi; analisis data Miles dan Huberman	Evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn: efektivitas dan efisiensi	Kelurahan Baadia, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara	Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mampu meringankan beban pengeluaran pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tetapi belum efektif mengurangi kemiskinan karena masih terjadi ketidaktepatan sasaran, kurangnya sosialisasi, serta pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lambat. Efisiensi pelaksanaan juga belum optimal akibat lemahnya koordinasi dan validasi data penerima
3	(Talita Amanda Azarine &	Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan	Deskriptif kualitatif; wawancara,	Efektivitas program berdasarkan teori Budiani; sosialisasi	Desa Karangduwu r, Kecamatan	Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dinilai belum sepenuhnya efektif karena aspek sosialisasi masih lemah. Namun, ketepatan

No	Peneliti & tahun	Judul	Metode Penelitian	Variabel penelitian	Lokasi	Temunn utama
	Didik Gunawan Suharto, 2024)	Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Karangduwur, Kabupaten Kebumen	observasi, dokumentasi; analisis data kualitatif	program, ketepatan sasaran, pemantauan program, dan pencapaian tujuan	Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah	sasaran, pemantauan program, dan pencapaian tujuan telah berjalan sangat efektif melalui pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pengawasan berjenjang, dan pemenuhan kebutuhan pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
4	(Anastasya Nur Febiyanti, & Weni Rosdiana, 2026)	*Systematic Literature Review*: Evaluasi Kebijakan Program Bantuan.Pangan Non-Tunai (BPNT) Berdasarkan Model William N Dunn	*Systematic Literature Review (SLR)* terhadap 10 artikel ilmiah; mayoritas menggunakan pendekatan kualitatif	Evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn; efektivias, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sasaran	Berbagai wilayah di Indonesia	Hasil kajian menunjukan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mampu membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, namun implementasinya masih menhadapi berbagai kendala, terutama ketidaktepatan sasaran akibat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum mutakhir, keterlambatan, penyaluran, keterbatasan akses e-Warong, serta kualitas dan kecukupan bantuan yang belum optimal
5	(Kharisma Kartini, & Siti Nurhayati Nafsiah, 2025)	Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Anggaran dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Dinas Sosial Kota Palembang: Kajian atas Ketepatan Sasaran, Ketepatan Waktu, dan Transparansi	Kualitatif dengan metode studi kasus; wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi; analisis data tematif	Efektivitas pengelolaan anggaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan transparansi	Kota Palembang, Sumatera Selatan	Pengelolaan anggaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dinilai cukup efektif, terutama pada aspek ketepatan waktu penyaluran. Namun, ketepatan sasaran dan transparansi belum optimal karena masih terdapat data penerima yang tidak akurat, keterlambatan akibat kendala teknis, serta kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Penelitian merekomendasikan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), peningkatan koordinasi antarlembaga, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah dalam penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh melalui penelitian diharapkan merupakan data yang valid sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi suatu permasalahan. (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-evaluatif dengan pendekatan kualitatif yang didukung oleh analisis spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi ketepatan sasaran distribusi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Simpang Kelayang. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai proses pendataan calon penerima, mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta berbagai faktor yang memengaruhi ketepatan sasaran program. Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi lapangan, dan telaah dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai.

Analisis spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dimanfaatkan untuk memetakan persebaran lokasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Simpang Kelayang serta menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan. Pemetaan tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi penerima Bantuan Pangan Non Tunai dan kondisi

kesejahteraan masyarakat secara keruangan. Dalam penelitian ini, analisis spasial tidak digunakan sebagai dasar utama dalam menentukan ketepatan sasaran melalui overlay, melainkan sebagai analisis pendukung untuk menggambarkan kondisi wilayah penelitian.

Selanjutnya, ketepatan sasaran Bantuan Pangan Non Tunai dievaluasi dengan membandingkan kondisi aktual Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan karakteristik sosial dan ekonomi dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program serta informasi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan pendekatan deskriptif-evaluatif, penelitian ini tidak hanya menggambarkan persebaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai secara spasial, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian penerima berdasarkan status desil dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian sasaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai serta memberikan gambaran mengenai kondisi penerima yang dapat menjadi masukan bagi upaya perbaikan dan pemutakhiran data penerima bantuan di Kelurahan Simpang Kelayang.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Simpang Kelayang, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kelurahan ini merupakan wilayah yang melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan memiliki keragaman kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga relevan untuk dilakukan evaluasi terhadap distribusi bantuan serta sebaran tingkat kesejahteraan masyarakat secara spasial.

3.2.2. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini disusun dalam rentang waktu yang menyesuaikan kebutuhan setiap tahapan penelitian, dimulai dari tahap persiapan, pengumpulan data di lapangan, hingga pengolahan data dan penyusunan laporan akhir.

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi objek yang alamiah (*natural setting),* sehingga peneliti memperoleh data secara langsung dari sumber data di lapangan (Sugiyono 2013).

Tabel 3.1. Penyusunan Skripsi

No	Nama Kegiatan	Tahun/Bulan								
		2025	2026							
		12	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengajuan Judul									
2	Penerbitan SK									
3	Penyusunan Proposal									
4	Seminar Proposal									
5	Pengumpulan Data									
6	Seminar Hasil									
7	Sidang Skripsi									

Sumber: Olah Data Penulis (2026)

3.3. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel dan indikator disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian yang mencakup persebaran spasial serta kondisi sosial dan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Indikator kondisi sosial dan ekonomi digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual Keluarga Penerima Manfaat sebagai bahan evaluasi ketepatan sasaran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Adapun variabel dan indikator penelitian disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Indikator dan Variabel Penelitian

No	Rumusan Masalah	Variabel	Indikator
1	Bagaimana Persebaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai berdasarkan lokasi dan kelompok desil?	Persebaran spasial	Lokasi Keluarga Penerima Manfaat, lingkungan, koordinat, desil
2	Bagaimana ketepatan sasaran Bantuan Pangan Non Tunai berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat?	Ketepatan sasaran	Karakteristik sosial dan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat meliputi pendidikan, hunian, fasilitas dasar, pekerjaan, pendapatan, pengeluaran, tabungan, aset, lahan, usaha tambahan

Sumber: Diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dan Kementerian Sosial Republik Indonesia

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Data Primer

1. Wawancara dengan aparat kelurahan dan masyarakat penerima.
2. Observasi kondisi lingkungan permukiman dan aksesibilitas wilayah.
3. Titik koordinat lokasi rumah penerima (menggunakan GPS/HP atau digitasi peta).

3.4.2. Data Sekunder

1. Data daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai dari kantor kelurahan.
2. Data indikator kesejahteraan masyarakat yang meliputi pendapatan, kondisi rumah, pekerjaan, dan kepemilikan aset, yang didapat dari data kelurahan, Badan Pusat Statistik, serta hasil wawancara lapangan
3. Peta administrasi kelurahan dan batas lingkungan.

3.5. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seluruh Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Simpang Kelayang. Berdasarkan

data penerima bantuan yang diperoleh pada saat penelitian terdapat sebanyak 80 Keluarga Penerima Manfaat yang menjadi penerima Bantuan Pangan Non Tunai di wilayah penelitian. Seluruh Keluarga Penerima Manfaat tersebut dijadikan responden penelitian sehingga tidak dilakukan pengambilan sebagian sampel dari populasi penerima bantuan.

Penggunaan seluruh Keluarga Penerima Manfaat sebagai responden dilakukan karena jumlah penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Simpang Kelayang relatif terbatas dan seluruh data penerima dapat dijangkau dalam pelaksanaan penelitian. Dengan demikian, data kondisi sosial dan ekonomi yang diperoleh menggambarkan kondisi seluruh Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai yang terdata dalam wilayah penelitian pada saat penelitian dilakukan.

Subjek penelitian terdiri atas:

1. Masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Simpang Kelayang, yang dipilih dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat kesejahteraan dan persebaran wilayah tempat tinggal, guna memperoleh informasi mengenai kondisi kesejahteraan yang dirasakan serta pengalaman selama menerima bantuan.
2. Aparat kelurahan atau pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai, khususnya dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan, untuk menggali informasi terkait mekanisme distribusi, kriteria penetapan penerima, serta berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Kuesioner, diberikan kepada seluruh 80 Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai untuk memperoleh data mengenai karakteristik sosial dan ekonomi rumah tangga, meliputi pendidikan, kondisi hunian, akses fasilitas dasar, pekerjaan, pendapatan, pengeluaran, kepemilikan aset, tabungan, lahan, dan usaha tambahan.
2. Wawancara, dilakukan kepada Keluarga Penerima Manfaat dan informan pendukung dari pihak kelurahan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kondisi penerima, pengalaman menerima bantuan, mekanisme penyaluran, serta informasi terkait pendataan dan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai.
3. Observasi lapangan, dilakukan dengan mengamati kondisi tempat tinggal, lingkungan sekitar rumah, akses fasilitas dasar, kondisi jalan, dan kondisi aktual rumah tangga penerima bantuan.
4. Dokumentasi, berupa data penerima Bantuan Pangan Non Tunai, dokumen kelurahan, hasil kuesioner, dokumentasi kondisi rumah, serta dokumen pendukung lainnya.
5. Pengumpulan data spasial, berupa peta administrasi wilayah dan lokasi tempat tinggal 80 Keluarga Penerima Manfaat yang digunakan untuk menggambarkan persebaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai secara spasial.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didukung oleh analisis data kuantitatif sederhana dan analisis spasial

menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Analisis dilakukan untuk menggambarkan persebaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta mengevaluasi kesesuaian kondisi sosial dan ekonomi penerima bantuan dengan karakteristik kelompok masyarakat yang menjadi sasaran Program Sembako.

Analisis spasial digunakan untuk menggambarkan lokasi dan persebaran Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Simpang Kelayang berdasarkan wilayah tempat tinggal dan informasi desil yang tersedia. Sementara itu, evaluasi ketepatan sasaran dilakukan melalui analisis kondisi sosial dan ekonomi 80 Keluarga Penerima Manfaat, informasi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), karakteristik kemiskinan, serta hasil observasi dan wawancara lapangan.

Dengan demikian, hasil analisis spasial tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan ketepatan sasaran. Sistem Informasi Geografis berfungsi memberikan gambaran keruangan mengenai lokasi dan persebaran penerima, sedangkan penilaian ketepatan sasaran dilakukan melalui keterkaitan informasi spasial dengan kondisi sosial ekonomi dan posisi kesejahteraan relatif penerima bantuan.

3.7.1. Persiapan Data

Tahap awal dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data yang diperlukan, meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner kepada penerima Bantuan Pangan Non Tunai. Data sekunder diperoleh dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), data penerima Bantuan Pangan Non Tunai, serta peta administrasi Kelurahan Simpang Kelayang.

Selanjutnya dilakukan proses editing, dan tabulasi data. Data yang telah diperoleh diperiksa kembali untuk memastikan kelengkapan dan konsistensinya sebelum diolah lebih lanjut. Untuk keperluan analisis spasial, setiap lokasi rumah responden ditentukan koordinat geografisnya. Apabila data telah memiliki koordinat, maka data dapat langsung digunakan. Namun apabila data masih berupa alamat, maka alamat tersebut diubah menjadi titik koordinat geografis berdasarkan lokasi tempat tinggal responden sehingga dapat digunakan dalam pemetaan..

3.7.2. Pemetaan (Mapping)

Setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ditampilkan dalam bentuk titik berdasarkan koordinat lokasi tempat tinggal. Pemetaan dilakukan menggunakan perangkat lunak ArcGIS untuk menggambarkan persebaran 80 Keluarga Penerima Manfaat di Kelurahan Simpang Kelayang. Setiap titik penerima dilengkapi dengan informasi atribut yang tersedia, seperti lingkungan tempat tinggal dan kelompok desil kesejahteraan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Hasil pemetaan digunakan untuk mengetahui lokasi penerima, persebaran penerima pada setiap lingkungan, serta pola persebaran berdasarkan kelompok desil. Peta tersebut selanjutnya digunakan sebagai informasi pendukung dalam pembahasan ketepatan sasaran, terutama untuk melihat keterkaitan antara lokasi penerima dengan kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga.

3.7.3. Analisis Spasial

Analisis spasial dilakukan menggunakan perangkat lunak ArcGIS untuk menggambarkan persebaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Simpang Kelayang. Tahapan analisis meliputi:

1. Input data koordinat lokasi 80 Keluarga Penerima Manfaat.
2. Input atribut linkungan san desil.
3. Pembuatan layer titik Keluarga Penerima Manfaat.
4. Penyajian peta persebaran.
5. Interpretasi pola persebaran berdasarkan lingkungan dan desil.
6. Menghubungkan hasil spasial dengan hasil kondisi sosial dan ekonomi pada tahap pembahasan.

Hasil analisis spasial digunakan untuk memberikan gambaran mengenai persebaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai secara keruangan. Analisis spasial tidak digunakan sebagai dasar tunggal dalam menentukan ketepatan sasaran, tetapi menjadi informasi pendukung dalam menghubungkan lokasi penerima dengan kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga.

3.7.4. Analisis Ketepatan Sasaran

Analisis ketepatan sasaran dalam penelitian ini difokuskan pada identifikasi *inclusion error*, yaitu kondisi ketika rumah tangga yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) memiliki karakteristik yang tidak sesuai dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program. Fokus tersebut disesuaikan dengan data penelitian yang berasal dari rumah tangga yang telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Sementara itu, *exclusion error* tidak menjadi fokus penelitian karena analisis tersebut memerlukan data rumah tangga yang tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai tetapi memiliki karakteristik yang sesuai dengan kelompok sasaran. Data tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian sehingga tidak dapat dianalisis secara valid.

Identifikasi *inclusion error* dilakukan dengan menganalisis kondisi sosial dan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan hasil kuesioner terhadap 80 responden, kemudian mengaitkannya dengan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran program bantuan sosial berdasarkan peraturan dan sumber resmi yang relevan. Informasi desil Keluarga Penerima Manfaat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melihat kondisi kesejahteraan rumah tangga. Hasil analisis tersebut diperkuat dengan hasil observasi dan wawancara mengenai kondisi aktual rumah tangga penerima bantuan.

Dalam penelitian ini, *inclusion error* tidak ditentukan berdasarkan hasil scoring atau klasifikasi tingkat kesejahteraan yang dibuat oleh peneliti, tetapi berdasarkan kesesuaian antara kondisi sosial dan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat, informasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dan karakteristik kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program Bantuan Pangan Non Tunai.

3.7.5. Penyajian Data

Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel, grafik, peta tematik, dan peta persebaran untuk mempermudah interpretasi hasil penelitian. Penyajian data dilakukan secara sistematis sehingga dapat menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat dan ketepatan sasaran distribusi Bantuan Pangan Non Tunai.

3.7.6. Analisis Deskriptif Kualitatif

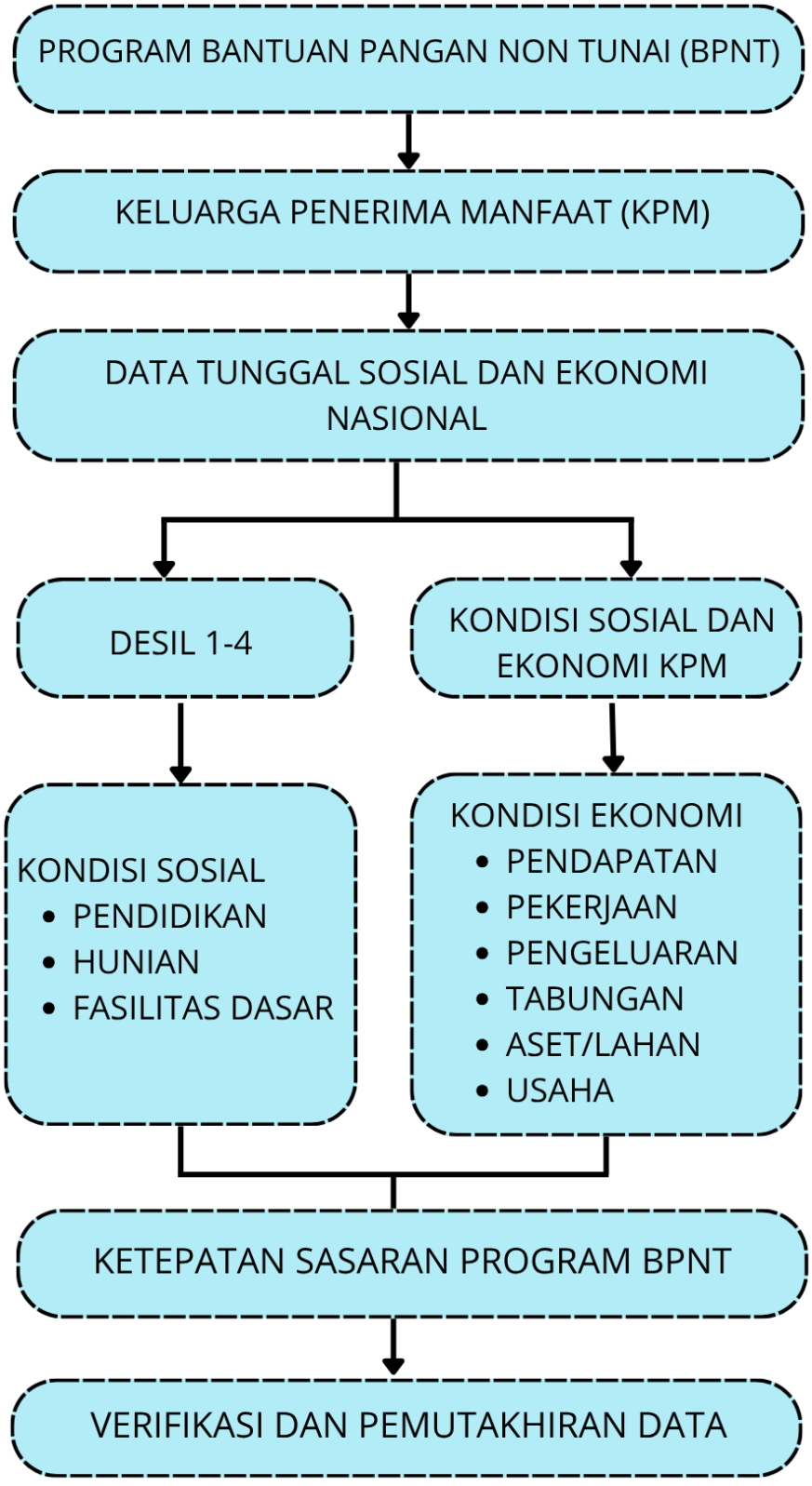
Hasil analisis kuantitatif dan spasial kemudian diperkuat dengan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan

kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan sasaran Bantuan Pangan Non Tunai.

3.7.7. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dilakukan dengan mengintegrasikan hasil analisis kondisi sosial dan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), analisis spasial, serta analisis deskriptif untuk menarik kesimpulan mengenai ketepatan sasaran distribusi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Simpang Kelayang. Kesimpulan disusun berdasarkan kesesuaian kondisi sosial dan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat dengan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran program, dengan mempertimbangkan informasi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta kondisi aktual yang ditemukan melalui survei lapangan. Hasil penelitian selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai.

3.8. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi ketepatan sasaran distribusi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berbasis analisis spasial di Kelurahan Simpang Kelayang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Persebaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Simpang Kelayang terdiri atas 80 Keluarga Penerima Manfaat yang tersebar pada empat lingkungan, yaitu Kedondong sebanyak 24 Keluarga Penerima Manfaat, Pasar sebanyak 10 Keluarga Penerima Manfaat, Batu Betanam sebanyak 23 Keluarga Penerima Manfaat, dan Lebuh Pendek sebanyak 23 Keluarga Penerima Manfaat. Berdasarkan kelompok desil, terdapat 13 Keluarga Penerima Manfaat pada Desil 1, 33 Keluarga Penerima Manfaat pada Desil 2, 14 Keluarga Penerima Manfaat pada Desil 3, dan 20 Keluarga Penerima Manfaat pada Desil 4. Secara spasial, persebaran Keluarga Penerima Manfaat menunjukkan pola yang berbeda antarwilayah. Pada Lingkungan Kedondong, penerima cenderung mengikuti pola memanjang di sekitar Jalan Lintas Air Molek–Taluk Kuantan, sedangkan pada Lingkungan Batu Betanam persebarannya relatif lebih menyebar. Sementara itu, pada Lingkungan Lebuh Pendek dan Pasar, titik penerima cenderung lebih mengelompok. Persebaran tersebut lebih berkaitan dengan pola permukiman dan jaringan akses wilayah, sedangkan berdasarkan kelompok desil tidak terlihat pengelompokan spasial yang tegas. Dengan demikian, analisis spasial dalam penelitian ini memberikan

gambaran mengenai distribusi dan lokasi Keluarga Penerima Manfaat serta menjadi informasi pendukung dalam evaluasi ketepatan sasaran.

2. Ketepatan sasaran distribusi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Simpang Kelayang secara umum menunjukkan kesesuaian dengan kelompok sasaran program. Seluruh 80 Keluarga Penerima Manfaat yang diteliti berada pada Desil 1–4 atau kelompok 40 persen rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan relatif terendah berdasarkan pengelompokan desil dalam data sosial ekonomi pemerintah. Kesesuaian tersebut diperkuat oleh kondisi sosial ekonomi hasil penelitian, yaitu 75 Keluarga Penerima Manfaat memiliki pekerjaan tidak tetap, 71 Keluarga Penerima Manfaat memiliki pendapatan utama kurang dari Rp3.000.000 per bulan, 74 Keluarga Penerima Manfaat tidak memiliki tabungan, dan 54 Keluarga Penerima Manfaat tidak memiliki usaha tambahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penerima masih menghadapi keterbatasan dalam stabilitas dan kapasitas ekonomi rumah tangga. Pada aspek hunian dan fasilitas dasar juga masih ditemukan keterbatasan, antara lain 38 Keluarga Penerima Manfaat menggunakan dinding kayu atau semi permanen, 6 Keluarga Penerima Manfaat masih menggunakan sungai sebagai sumber air, dan 3 Keluarga Penerima Manfaat tidak memiliki toilet sendiri. Di sisi lain, terdapat 65 Keluarga Penerima Manfaat yang memiliki rumah sendiri, 72 Keluarga Penerima Manfaat memiliki sepeda motor, dan 56 Keluarga Penerima Manfaat memiliki lahan, kebun, atau sawah. Kepemilikan aset tersebut tidak secara otomatis menunjukkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat tidak layak menerima bantuan karena harus dilihat bersama kondisi pekerjaan, pendapatan, tabungan, usaha tambahan,

kualitas hunian, fasilitas dasar, serta kondisi sosial ekonomi rumah tangga secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan data dan kondisi yang tersedia, tidak ditemukan indikasi kuat mengenai ketidaktepatan sasaran pada 80 Keluarga Penerima Manfaat yang diteliti. Namun, penelitian ini tidak dapat menyimpulkan ada atau tidaknya *exclusion error* karena penelitian tidak mencakup rumah tangga yang tidak menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai sebagai kelompok pembanding. Hasil penelitian juga menunjukkan pentingnya pemutakhiran data secara berkala agar data penerima tetap sesuai dengan perubahan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, perlu adanya verifikasi dan pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat secara berkala agar data penerima bantuan tetap sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Hal ini penting terutama karena kondisi sosial ekonomi rumah tangga dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan pekerjaan, pendapatan, kondisi hunian, kepemilikan aset, maupun kemampuan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga perlu diperhatikan dalam proses pemutakhiran data. Temuan terhadap beberapa Keluarga Penerima Manfaat yang memiliki kondisi relatif lebih baik dibandingkan mayoritas penerima juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut, tanpa langsung menyatakan bahwa penerima tersebut tidak layak menerima bantuan.

Selain itu, informasi mengenai persebaran Keluarga Penerima Manfaat yang dihasilkan melalui analisis spasial dapat dimanfaatkan sebagai data pendukung dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial di Kelurahan

Simpang Kelayang. Peta persebaran Keluarga Penerima Manfaat dapat diperbarui secara berkala dan dikembangkan dengan menggabungkan informasi sosial ekonomi penerima, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi penerima dan persebarannya di wilayah kelurahan.

Untuk penelitian selanjutnya, evaluasi ketepatan sasaran Bantuan Pangan Non Tunai dapat dikembangkan dengan melibatkan rumah tangga yang tidak menerima bantuan sebagai kelompok pembanding. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai ketepatan sasaran, termasuk kemungkinan terjadinya *inclusion error* maupun *exclusion error*. Analisis spasial juga dapat dikembangkan dengan menghubungkan persebaran Keluarga Penerima Manfaat dengan kondisi wilayah, seperti akses terhadap fasilitas pelayanan dasar, jaringan jalan, pusat pelayanan, dan pola permukiman, sehingga aspek keruangan dalam evaluasi program bantuan sosial dapat dikaji secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2025. *Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Badan Pusat Statistik. 2025. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2025. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2025*. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

Badan Pusat Statistik. 2025. *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2025. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2025*. Pekanbaru: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2025. *Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2026. *Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia September 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2026. *Profil Kemiskinan di Indonesia, September 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

International Labour Organization. 2023. *Basic Concepts and Background on Social Protection.* Geneva: International Labour Organization.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2017. *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).* Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2020. *Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020.* Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Perlindungan Sosial*. Fiskalpedia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Khairi, M. (2023). *Sistem Informasi Geografis Untuk Pemetaan Penerima Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Petunjungan*. Journal of Electrical Engineering and Computer (JEECOM), 5(2).

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Program Sembako.* Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. 2025. *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan*

Kemiskinan Ekstrem. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2025. *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.* Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2025. *Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai Dasar Penyaluran Bantuan Sosial.* Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2025. *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga.* Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Nafsiah, S.N., & Kartini, K. (2025). *Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Anggaran dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) oleh Dinas Sosial Kota Palembang: Kajian atas Ketepatan Sasaran, Ketepatan Waktu, dan Transparansi.* Economic Reviews Journal, 4(3).

Organisation for Economic Co-operation and Development. 2019. *Social Protection System Review of Indonesia.* OECD Development Pathways. Paris: OECD Publishing.

Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Pasal 34.

Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.* Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.* Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.* Jakarta.

Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.* Jakarta.

Republik Indonesia. 2020. *Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 tentang Reformasi Perlindungan Sosial*. Jakarta.

Risnandar., Hudha, S. A., Ikhsanudin., & Hermawati, I. (2022). *Indikator Kinerja Utama Program Bantuan Sosial Pangan di Indonesia: Analisis Faktor Konfirmatori.* Jurnal Masyarakat dan Desa, 2(1).

Republik Indonesia. 2025. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional*. Jakarta.

Rosdiana, W., & Febiyanti, A. N. (2026). *Systematic Literature Review: Evaluasi Kebijakan Program Bantuan.Pangan Non-Tunai (BPNT) Berdasarkan Model William N Dunn.* Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, 3(1), 01-19.

Sadat, A., Ahmad, F.Y.N., & Asrin. (2022). *Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Baadia Kota Baubau.* Journal of Government Science Studies, 1(2), 86-94.

Suharto, D. G., & Azarine, T. A. (2024). *Efektivitas Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Karangduwur, Kabupaten Kebumen.* Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, 4(1), 180-194.

World Bank. 2022. *A New Look at Old Dilemmas: Revisiting Targeting in Social Assistance.* Washington, DC: World Bank.

World Bank. 2023. *Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security*. Washington, DC: World Bank.

Yuliana, F., Sujianto, & Firdaus, A. (2022). *Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bengkalis : Suatu Evaluasi*. Jurnal Ilmu Pemerintah, 4(1).